

## Representasi Hegemoni Gramsci dalam Novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* Karya Tere Liye

**Syahdidatul Faizah Maulidiastuti**<sup>1</sup>, (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia)

**Anas Ahmadi**<sup>2</sup>, (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia)

✉ [syahdidatul.23119@mhs.unesa.ac.id](mailto:syahdidatul.23119@mhs.unesa.ac.id)

**Abstrak:** Sastra merupakan refleksi dari realitas sosial dan memiliki keterkaitan erat dengan aspek psikologi serta dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hegemoni menjadi salah satu fenomena sosial yang sering muncul dalam karya sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk hegemoni yang terkandung dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci. Data dikumpulkan melalui teknik pembacaan kritis dan dianalisis dengan menelaah wacana ideologis dalam narasi novel. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk utama hegemoni: hegemoni kekuasaan, hegemoni pikiran, dan hegemoni media massa. Selain itu, ditemukan pula pengaruh ideologi kapitalisme, konservatisme, dan ekologiisme yang mendasari tindakan para tokoh. Temuan ini memperlihatkan bahwa karya sastra dapat menjadi media kritik sosial yang efektif dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengaruh hegemoni dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Hegemoni, Gramsci, kekuasaan, ideologi

**Abstract:** Literature is a reflection of social reality and is closely related to psychological aspects and the dynamics of community life. In this context, hegemony becomes one of the social phenomena that often appears in literary works. This research aims to identify and analyze the forms of hegemony contained in the novel "Teruslah Bodoh Jangan Pintar" by Tere Liye. This research uses a descriptive qualitative method with an approach based on Antonio Gramsci's theory of hegemony. Data were collected through critical reading techniques and analyzed by examining the ideological discourse in the novel's narrative. The research results show the presence of three main forms of hegemony: hegemony of power, hegemony of thought, and hegemony of mass media. In addition, the influence of the ideologies of capitalism, conservatism, and ecologism underlying the actions of the characters was also found. This finding shows that literary works can serve as an effective medium for social criticism and are expected to raise public awareness of the influence of hegemony in everyday life.

**Keywords:** Hegemony, Gramsci, power, ideology



Copyright ©tahunEUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)

Published by Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Sastra lahir dari kreativitas dan imajinasi manusia, tetapi tidak sepenuhnya lepas dari realitas sosial yang melingkupinya. Eagletown (2005, dalam (Ahmadi, 2023) menyebut sastra sebagai bentuk tulisan yang bersifat imajinatif. Sementara itu, (Ahmadi, 2023) menjelaskan bahwa fiksi merupakan narasi yang dibangun berdasarkan imajinasi, sedangkan fakta bersandar pada kejadian nyata. Meskipun kedua istilah tersebut sering dipertentangkan, dalam konteks sastra, fiksi dan fakta dapat saling berpadu. (Ahmadi, 2023)) menegaskan bahwa sastra tidak hanya menghadirkan dunia rekaan, tetapi juga menyerap fakta-fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, sastra tidak hanya menjadi wadah ekspresi imajinatif, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan kondisi sosial dan historis yang aktual. Beberapa karya sastra Indonesia yang menunjukkan hubungan antara sastra dengan realitas yang ada dalam masyarakat, seperti, novel *Namaku Alam* (Chudori, 2023) yang menggambarkan kondisi keluarga seorang tahanan politik yang terjadi pada tahun 1965. Novel *Laut Bercerita* (Chudori, 2017) yang menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada akhir masa Orde Baru. Novel *Entrok* (Madasari, 2010) yang menggambarkan keterkurungan dan perlawanan ketidakadilan yang terjadi pada masa Orde Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk hegemoni yang terdapat dalam narasi novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai jenis hegemoni yang dapat ditemukan dalam teks novel tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kajian sosiologi sastra, khususnya dalam penerapan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Dengan menganalisis novel ini menggunakan perspektif teori hegemoni, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur sastra yang menggabungkan aspek sosial dan kekuasaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian serupa di masa depan, dengan tujuan untuk memperluas cakupan analisis sastra melalui pendekatan sosiologis dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena sosial yang ada dalam karya sastra.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perluasan wawasan masyarakat dalam memahami fenomena hegemoni dalam kehidupan sosial. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap dinamika kekuasaan dan penindasan yang terjadi dalam struktur sosial tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat lebih peka terhadap cara-cara hegemoni bekerja dalam masyarakat, serta cara hal tersebut memengaruhi hubungan antara kelompok dominan dan subordinat. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pola pikir masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan fenomena sosial semacam ini dan proses hal itu dapat memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* dipilih sebagai objek penelitian karena novel ini mengangkat isu-isu yang sangat relevan dengan konsep hegemoni Gramsci. Khususnya, penggambaran tentang cara kekuasaan hegemoni dijalankan dan dominasi dipertahankan melalui persetujuan dari pihak-pihak yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok subordinat menjadi titik utama yang menarik untuk dikaji. Novel ini menampilkan berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan kekuasaan, dominasi, dan penindasan, yang dapat dianalisis melalui lensa teori hegemoni. Isu-isu yang diangkat dalam cerita ini mencerminkan realitas kehidupan sosial, khususnya mengenai proses struktur kekuasaan bekerja dalam membentuk kesadaran dan respons masyarakat. Oleh karena itu, novel ini dirasa tepat untuk dianalisis secara mendalam dalam konteks hegemoni, baik dari segi kekuasaan yang terstruktur maupun tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dalam masyarakat yang lebih luas.

### **Kajian Pustaka**

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji topik serupa di antaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh (Latifah & Putra, 2020) dengan judul *Representasi Hegemoni Kekuasaan pada Zaman Kolonial dan Orde Baru dalam Novel Balada Supri* mengungkapkan adanya kesamaan sistem kekuasaan antara periode kolonial dan Orde Baru di Indonesia. Latifah (2020) menyatakan bahwa meskipun kedua rezim tersebut muncul dalam konteks sejarah yang berbeda, mereka memiliki pola kekuasaan yang serupa dalam hal dominasi dan kontrol sosial. Selain itu, studi oleh (Wahyuni, 2019) dengan judul *Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Hujan Karya Tere Liye dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa formasi ideologi yang muncul dalam novel *Hujan* karya Tere Liye, yaitu otoritarisme, feodalisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan vandalisme. Hegemoni kekuasaan dalam novel ini terwujud baik di masyarakat sipil maupun politik, melalui pengendalian sosial dan struktur kekuasaan yang otoriter. Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, sehingga tidak hanya berfokus pada hegemoni saja. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Yunita & Putra, 2020) dengan judul *Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono* menghasilkan bahwa, hegemoni kekuasaan dalam novel *Dasamuka* karya Junaedi Setiyono berlangsung baik di masyarakat politik maupun masyarakat sipil, masing-masing dengan bentuk konkritisasi kekuasaan yang berbeda. Dalam masyarakat politik, kekuasaan terlihat pada struktur pemerintahan dan kontrol ideologis yang diterapkan oleh penguasa. Sementara itu, dalam masyarakat sipil, hegemoni tercermin melalui hubungan sosial yang dibangun di antara kelompok-kelompok masyarakat. Struktur sosial yang tergambar dalam novel ini terdiri dari tiga lapisan utama: penjajah/kolonialisme yang mendominasi, bangsawan sebagai kelas penguasa, dan wong cilik yang berada di bawah kekuasaan tersebut, menggambarkan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat bawah dalam konteks sejarah kolonial. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek

kajian. Dipilihnya novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye sebagai objek penelitian, serta pengangkatan aspek-aspek sosial yang terkandung dalam cerita, memungkinkan kajian mengenai dominasi dan hegemoni kekuasaan di Indonesia untuk lebih terlihat. Penelitian ini mendalami dinamika hubungan antara elit pengusaha dan pejabat politik, yang bekerja sama untuk membentuk struktur kekuasaan yang bersifat eksploitatif. Kolaborasi antara kedua kelompok ini menciptakan sistem yang mendominasi dan memanipulasi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat lokal, yang terjebak dalam sistem ini, sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Penelitian ini berfokus pada dampak dari hubungan antara elit pengusaha dan pejabat politik terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta cara struktur kekuasaan yang terbentuk menghambat upaya keadilan sosial.

## 1. Novel

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang menghadirkan sebuah dunia khayalan yang diimajinasikan lalu dibangun melalui unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, peristiwa, sudut pandang, dan lain sebagainya yang bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2013). Selain itu, cerita dalam novel tidak hanya didasarkan pada unsur internal, tetapi juga unsur eksterinsik. Peneliti sastra dan pembaca sastra dapat mengaitkan unsur ekstrinsik seperti filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan teknologi yang secara tidak langsung memengaruhi cerita dari luar. (Endraswara, 2013). Gambaran-gambaran kehidupan cerita melalui unsur-unsur tersebut, diciptakan oleh penulis dalam sebuah karya sastra untuk dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pembaca, sebab penulis pasti menggambarkan interaksi antar tokoh dengan berbagai perwatakan dan konflik. Tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita sebuah karya sastra merupakan tokoh rekaan. Namun, pembaca dapat mengenali personifikasi tokoh-tokoh tersebut berdasarkan ciri-ciri kepribadian tertentu yang berbeda-beda layaknya sifat manusia di dunia nyata. Beragam kepribadian tiap manusia kemudian berinteraksi dalam suatu lingkup sosial membuatnya terlihat tampak kompleks. Proses saling memengaruhi atau dipengaruhi antara manusia satu dan lainnya merupakan suatu kompleks yang rumit untuk dipahami sehingga membutuhkan penelaahan dan penelitian secara khusus.

Menurut Gramsci, sastra memiliki dimensi sosiologis-historis yang sangat terkait dengan isu hegemoni serta penciptaan kebudayaan baru. Ia berpendapat bahwa sastra dan seni bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperjuangkan "sastra baru" tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang lebih luas untuk membangun atau mengarahkan kepada "kebudayaan baru" (Anwar, 2015). Dalam konteks prosa atau karya sastra fiksi, istilah ini sering merujuk pada prosa cerita, prosa narasi, atau narasi berplot. Prosa di sini merupakan bentuk cerita yang disampaikan melalui karakter-karakter tertentu, dengan latar belakang, tahapan, dan rangkaian cerita yang dihasilkan dari imajinasi pengarang. Hal ini menciptakan narasi yang utuh dan terstruktur,

mencerminkan pandangan serta kreativitas pengarang. Karya fiksi dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk, termasuk roman, novelet, dan cerpen, yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara penyampaian yang berbeda (Aminuddin, 2015). Dengan demikian, pemahaman mengenai sastra dan fiksi menjadi sangat penting dalam konteks sosiokultural dan sejarah.

## 2. Hegemoni

Hegemoni merupakan konsep yang merujuk pada strategi untuk memengaruhi individu atau kelompok dalam konteks negara, dengan penguasaan ini sering kali berasal dari struktur negara yang terorganisir dan terstruktur (Gramsci, 2013)., menjelaskan bahwa dasar dari hegemoni berkaitan dengan dikotomi antara kekuatan dan persetujuan. Dalam pandangannya, hegemoni tidak terbatas pada aspek politik saja, tetapi juga meluas ke ranah ideologi dan budaya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan elemen-elemen dalam suprastruktur, termasuk di bidang kesusastraan, yang berkontribusi dalam membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat (Taum, 2015). Dengan demikian, esensi dari hegemoni adalah usaha untuk membangun cara pandang masyarakat agar dapat menilai dan memahami isu-isu sosial melalui kerangka yang telah ditentukan oleh kekuasaan yang dominan.

Dalam pelaksanaannya, hegemoni dapat terealisasi melalui beberapa cara. Pertama, bentuk dominasi yang terlihat dalam penguasaan fisik atau material, terjadi ketika satu kelompok mengendalikan kelompok lainnya. Kedua, terdapat aspek kepemimpinan moral dan intelektual, kelompok yang dominan menciptakan dan mempertahankan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kelompok sosial tertentu mendominasi kelompok lain untuk menaklukkan dan mengendalikan mereka .

(Gramsci, 2013) juga mencatat bahwa tujuan dari hegemoni adalah untuk memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi, individu-individu dalam struktur tersebut terus-menerus diciptakan, direproduksi, dan dikendalikan oleh norma-norma dan ideologi yang berlaku. Namun, hegemoni tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi seluruh masyarakat. Selalu ada individu atau sekelompok orang yang menolak atau menentang kekuasaan itu, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penolakan ini menunjukkan bahwa hegemoni bukanlah proses yang sepenuhnya berhasil, melainkan selalu terdapat ruang untuk perlawanan.

Salah satu ciri khas dari hegemoni adalah bahwa keberadaannya sering kali tidak disadari oleh masyarakat. Masyarakat cenderung menganggap semua kebijakan dan norma yang ada sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*). Dalam konteks ini, hegemoni menunjukkan bahwa dominasi satu kelas atas kelas lainnya berlangsung karena faktor ideologis dan politis yang beroperasi dalam lembaga sosial, tokoh intelektual, dan kelas sosial yang menjadi fokus perhatian (Pawestri, 2015). Gramsci mengidentifikasi tiga cara utama dalam memahami penyebaran ideologi. Pertama, melalui bahasa, penggunaan bahasa

mengandung elemen-elemen yang merefleksikan pemahaman tentang berbagai hal, termasuk hegemoni itu sendiri. Contohnya saja pada tulisan, tulisan memiliki kemampuan untuk menggerakkan manusia dan masyarakat (Ahmadi, 2020). Kedua, melalui *common sense*, yang merupakan pemahaman yang tidak sistematis dan permisif, ideologi diterima sebagai sesuatu yang normal dan tidak dipertanyakan. Ketiga, melalui folklor, yang berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang lebih luas, mencakup tradisi, opini, dan tindakan tertentu yang membentuk perilaku masyarakat (Faruk, 2010). Ketiga cara penyebaran ideologi ini memungkinkan kelompok-kelompok sosial untuk menyebarluaskan dan menerapkan ideologi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks sastra, penyebaran ideologi melalui hegemoni dapat terlihat dengan jelas. Karya sastra sering kali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap karya sastra menjadi penting untuk memahami sejauh mana pengaruh kekuasaan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Proses hegemoni dalam sebuah karya sastra dapat dijelaskan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, membangun kontak intelektual dengan subaltern, penulis menciptakan hubungan yang setia dan mendalam dengan kelompok yang terpinggirkan. Kedua, mendekonstruksi akal sehat dengan cara memperjuangkan ideologi subaltern, yang sering kali diabaikan atau diremehkan oleh kelompok dominan. Ketiga, melakukan kritik diri secara bawah sadar dan membangun konsensus di antara subaltern, kesadaran kolektif dibentuk untuk melawan dominasi yang ada (Gramsci, 2013).

Melalui pemahaman hegemoni dalam kerangka teori Gramsci, dapat dilihat proses kekuasaan beroperasi dalam masyarakat dan proses ideologi disebarluaskan serta diterima. Pemahaman ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang ada, serta potensi perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan. Dalam konteks kontemporer, berbagai bentuk dominasi dan pengaruh ideologis masih sangat relevan, analisis ini sangat penting.

### 3. Ideologi

Bagi Gramsci, ideologi lebih dari sekadar kumpulan gagasan; ia membedakan antara sistem ide yang berubah-ubah, yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu, dengan ideologi organik yang bersifat historis – yaitu ideologi yang muncul dalam konteks sosial tertentu. Selama ideologi tersebut historis relevan, ia memperoleh validitas psikologis yang mengatur cara berpikir dan bertindak manusia. Ideologi memberi kerangka bagi manusia untuk memahami posisi dan perjuangan mereka, serta menggerakkan mereka menuju kesadaran. Bagi Gramsci, ideologi bukanlah sekadar fantasi pribadi, melainkan terwujud dalam kehidupan kolektif masyarakat (Simon, 2004).

Gramsci melihat dunia gagasan, kebudayaan, dan superstruktur tidak hanya sebagai cerminan atau ekspresi dari struktur kelas ekonomi atau

infrastruktur material, melainkan sebagai salah satu 'kekuatan material itu sendiri'. Sebagai kekuatan material, dunia gagasan atau ideologi berfungsi untuk mengorganisasi massa, menciptakan ruang bagi manusia untuk bergerak dan berkembang.

#### 4. Negara

Negara tidaklah sebuah lembaga yang berdiri di atas masyarakat dan bertindak mengatur tanpa tujuan tertentu, melainkan merupakan alat yang digunakan oleh kelas-kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan kata lain, negara pada dasarnya tidak berfungsi untuk kepentingan umum, tetapi lebih untuk kepentingan kelas-kelas atas yang memegang kontrol. Hal ini mengungkapkan bahwa negara bukanlah entitas yang netral atau adil, melainkan berperan sebagai instrumen dominasi dalam menjaga struktur kekuasaan yang ada (Suseno, 2016)

Gramsci mengemukakan dua dimensi penting dalam konsep negara, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam konsep hegemoni karena menjadi wilayah tempat terbentuknya kesepakatan bersama atau "kehendak bebas" dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakat politik merupakan dimensi negara dalam pengertian yang lebih spesifik dan terkait dengan struktur kekuasaan formal melalui aparat-aparat pemerintah. Bagi Gramsci, negara tidak hanya mencakup lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup aparat hegemoni yang berada dalam masyarakat sipil – seperti media, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Melalui aparat-aparat ini, kelas penguasa bisa mengatur kesepakatan sosial dan menciptakan konsensus yang mendukung kepentingan mereka (Faruk, 2010).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Mengutip pendapat (Sugiyono, 2013), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam sebuah penelitian, kemudian peneliti tersebut berperan sebagai instrument kunci. Penelitian ini menekankan pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap data melalui perspektif atau interpretasi peneliti (Ahmadi, 2019) Data yang dihasilkan oleh metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, baik melalui tulisan atau lisan mengenai sifat suatu individu, situasi dan gejala sekelompok manusia tertentu yang dapat diamati polanya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjabarkan suatu visualisasi secara luas mengenai suatu fenomena-fenomena masyarakat yang kemudian ditampilkan dalam bentuk untaian kata-kata (Walidin et al., 2015) Penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka, namun kedalaman pemahaman terhadap proses dalam konsep yang sedang dikaji secara empiris. (Siswanto, 2010) berpendapat bahwa metode deskripsi adalah prosedur permasalahan yang dikaji dengan menggambarkan atau memvisualisasikan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan kenyataan yang tampak.

Sumber penelitian ini adalah novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* (2024) karya Tere Liye. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kata, kalimat, monolog, dan dialog yang terdapat dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, yang berkaitan dengan konsep hegemoni. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode membaca dan mencatat. Novel tersebut dibaca dengan menelusuri elemen-elemen yang berhubungan dengan hegemoni, termasuk kata, kalimat, dialog, dan paragraf yang relevan, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini mengaplikasikan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci. Teori ini diterapkan untuk mengidentifikasi aktivitas dan strategi kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam memengaruhi karakter lain yang ada dalam narasi cerita.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, Tere Liye menggambarkan dengan mendalam suasana dan runtutan sebuah persidangan yang berfokus pada gugatan terhadap PT. Semesta Minerals & Mining, sebuah perusahaan tambang yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Persidangan ini menjadi pusat dari konflik yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang terdampak, aktivis lingkungan, serta pengusaha besar. Dalam novel ini, tidak ada karakter utama yang tetap, karena setiap perubahan subbab disertai dengan pergantian sudut pandang naratif. Meskipun demikian, beberapa karakter memainkan peran penting dalam memajukan alur cerita, antara lain Tuan Liem sebagai pemilik PT. Semesta, dua aktivis lingkungan yang menjadi penggugat. Serta karakter-karakter lain yang menjadi saksi dalam persidangan ini.

Cerita dimulai dengan menggambarkan eksploitasi sumber daya alam oleh PT. Semesta Minerals & Mining yang tidak hanya merusak lingkungan sekitar, tetapi juga mengabaikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga setempat. Eksploitasi ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Masyarakat yang merasa hak-haknya terampas mulai melakukan protes dan berbagai upaya penolakan terhadap keberadaan perusahaan. Namun, upaya mereka untuk melawan menjadi semakin sulit karena perusahaan tambang tersebut mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah. Pemerintah, melalui aparat militer, dikerahkan untuk meredam aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menciptakan ketegangan antara kekuatan kapital dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak lingkungan dan sosial. Novel ini tidak hanya menggambarkan ketimpangan kekuasaan yang terjadi, tetapi juga menyoroti hubungan antara pengusaha dan pejabat politik berperan dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang eksploitatif.

## Hegemoni

### a) Hegemoni Kekuasaan

““Jangan dibuat rumit, Pak Kadus. Atau nanti semua urusan penduduk ikut rumit.” Komandan tentara menatap dingin. Di dadanya tertulis nama, ‘Bacok’, menilik pangkatnya, dia seorang Mayor. Pak Kadus menelan ludah, menoleh tetua kampung lain— yang terdiam” (Tere Liye, 2024: 27)

Potongan dialog tersebut menunjukkan dinamika kekuasaan yang mencerminkan praktik otoritarianisme dalam hubungan sosial antara aparat negara (Mayor Bacok) dan masyarakat lokal. Pak Kadus dan para tetua desa mengalami dominasi dalam bentuk koersi verbal, yang menekan mereka untuk menerima kondisi status quo tanpa perlawanan. Dalam konteks ini, Mayor Bacok memosisikan dirinya sebagai otoritas tertinggi yang mengendalikan proses pengambilan keputusan, menunjukkan pola komunikasi yang menekankan kontrol dan subordinasi. Struktur kekuasaan militer digambarkan sebagai sistem yang tidak hanya memaksa secara fisik, tetapi juga menanamkan ideologi dominatif yang diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Hal ini mencerminkan hegemoni dalam pengertian Gramsci, yaitu ketika kelas bawah menerima dominasi kelompok elit secara pasif karena ideologi yang ditanamkan telah menjadi *common sense*. Kepatuhan mereka bukan semata hasil dari paksaan langsung, melainkan akibat penerimaan ideologis yang sudah mengakar (Siswati, 2017)

““Apa susahnya memindahkan penduduk di kampung itu?” “Sebagian besar dari mereka memiliki surat-surat tanah, Pak. Pemilik sah lahan. Kita tidak bisa memaksa mereka pergi. Itu bukan hutan atau gunung tanpa pemilik.” Orang kepercayaan SIIP menjawab – dia tadi siang bergegas kembali ke ibu kota dengan helikopter, melapor kemajuan pembebasan lahan.” (Tere Liye, 2024: 181)

Kutipan tersebut merefleksikan bentuk hegemoni kekuasaan dalam konteks pengambilalihan lahan milik masyarakat oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, perwakilan SIIP berupaya melegitimasi pembebasan lahan dengan dalih pembangunan proyek strategis, meskipun masyarakat lokal memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Pernyataan seperti “Apa susahnya memindahkan penduduk di kampung itu?” menunjukkan sikap merendahkan serta upaya merasionalisasi pengabaian terhadap hak-hak warga. Hal ini mengindikasikan bahwa dominasi tidak semata dilakukan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui normalisasi ideologi pembangunan yang dianggap lebih penting daripada hak individu. Hegemoni terjadi ketika ketimpangan kekuasaan dilembagakan melalui mekanisme hukum dan administratif yang tampak legal, tetapi sesungguhnya menguntungkan kelompok elit. Dalam kerangka teori Gramsci, situasi ini mencerminkan cara kekuasaan hegemonik beroperasi melalui kombinasi *coercion* dan *consent*, yakni ketika masyarakat yang dirugikan tidak menunjukkan perlawanan karena menginternalisasi ideologi dominan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dapat ditolak.

## b) Hegemoni Pikiran

"Semua tanah adalah milik negara. Termasuk gunung di atas sana. Maka negara tentu berhak memberikan tanah itu ke pihak lain, demi kepentingan bersama. Tambang emas ini akan membawa kemajuan, tidak hanya untuk pulau ini, tapi juga seluruh provinsi, seluruh negara. Pajak-pajak. Royalti tambang." (Tere Liye, 2024: 104)

Potongan dialog ini menunjukkan upaya pegawai tambang dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pembenaran atas pengambilalihan tanah dan eksploitasi sumber daya alam. Melalui klaim bahwa proyek tersebut akan membawa kemajuan dan manfaat bagi banyak pihak, narasi yang dibangun diarahkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini merupakan kepentingan bersama, meskipun kenyataannya lebih menguntungkan kelompok elit tertentu. Wacana semacam ini mencerminkan strategi hegemonik yang bekerja melalui pembentukan kesadaran, bukan paksaan. Konsensus sosial tercipta ketika masyarakat menerima kebijakan yang merugikan mereka sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan menguntungkan, karena ideologi dominan telah mengakar dalam cara berpikir mereka. Dalam konteks teori Gramsci, dominasi ideologis semacam ini merupakan bentuk *hegemoni pikiran*, yakni ketika penguasa tidak lagi membutuhkan tekanan langsung karena telah menguasai keyakinan dan pandangan dunia masyarakat melalui proses internalisasi ideologi.

"Kami paham keberatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tapi ini program pemerintah. Orang-orang dari kota itu bersuara meningkahi suara penduduk, "Baik, bagaimana jika kami membeli lahan sawah, pekarangan seharga Rp 10.000 per meter, dan Rp 20 Juta ganti rugi untuk setiap rumah dan bangunan? Agar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa membangun rumah baru. Tawaran kami sudah bagus sekali loh, lebih baik dibanding harga sekitar, silakan dicek." (Tere Liye, 2024: 180)

Kutipan tersebut menunjukkan upaya orang-orang dari kota dalam membentuk konsensus bahwa keputusan penguasa adalah hal yang paling tepat, meskipun keputusan tersebut cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan rakyat. Penyebutan istilah "program pemerintah" dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut sah secara hukum dan harus diterima tanpa perdebatan. Narasi semacam ini merupakan bentuk dominasi ideologis yang bertujuan mengarahkan kesadaran kolektif agar publik memandang kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan untuk kepentingan bersama. Berbagai tawaran yang diberikan justru berfungsi mengalihkan perhatian dari persoalan substansial, seperti hak atas tanah dan dampak sosial jangka panjang akibat relokasi. Dalam kerangka teori Gramsci, situasi ini mencerminkan praktik hegemoni yang tidak hanya bergantung pada kekuatan koersif, melainkan juga pada kontrol terhadap wacana dan produksi makna yang membuat ketimpangan kekuasaan tampak adil dan sah.

### **c) Hegemoni Media massa**

“Aku tidak berhasil memuat berita itu.” Ibu Sri menghela napas, “Aku berhasil menulisnya. Tapi kepala redaksi pengecut. Dia gemetar saat menerima telepon dari seseorang. Bergegas menyuruh liputanku dicopot, digantikan berita kegiatan ibu-ibu pejabat mengunjungi taman bunga baru.” (Tere Liye, 2024: 59)

Fenomena dalam kutipan tersebut merefleksikan posisi media massa sebagai instrumen dominasi ideologis yang rentan terhadap pengaruh kekuasaan eksternal. Alih-alih bersikap netral atau independen, media kerap terjalin dalam relasi yang erat dengan struktur kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga penyampaian informasi tidak bebas nilai. Dalam banyak kasus, media diarahkan untuk membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu tertentu sesuai dengan kepentingan kelompok dominan. Hegemoni media tidak hanya tampak dalam penyajian berita, tetapi juga dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan cara berpikir kolektif. Melalui pemilihan isu dan pbingkaian narasi, media menentukan agenda publik serta memperkuat ideologi dominan, sekaligus mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari perspektif alternatif. Dalam kerangka teori Gramsci, media massa berfungsi sebagai alat ideologis yang memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan memengaruhi cara masyarakat mengkonstruksi realitas sosial, politik, dan ekonomi.

### **Ideologi**

#### **a) Ideologi Kapitalisme**

"Jika pelabuhan besar itu jadi, juga pembangkit tenaga listrik, pabrik-pabrik jadi, maka akan banyak lowongan pekerjaan terbuka bagi penduduk. Ribuan, loh. Kata siapa kita akan kehilangan mata pencaharian? Malah lebih mantap, toh, jadi karyawan kantoran. Gaji bulanan. Betul atau betul?" (Tere Liye, 2024)

Kutipan tersebut mencerminkan ideologi kapitalisme yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur besar sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pelabuhan, pembangkit listrik, dan pabrik diposisikan sebagai instrumen utama untuk menarik investasi dan mempercepat akumulasi kapital. Penekanan terhadap pekerjaan dengan gaji tetap dan status sebagai karyawan kantoran memperlihatkan bias kapitalistik terhadap pekerjaan formal, yang dipandang lebih stabil dan bernilai secara ekonomi. Dalam pandangan (Hasan & Mahyudi, 2020), kapitalisme merupakan tatanan sosial yang lahir dari sistem produksi yang memisahkan pekerja dari alat produksi, sehingga hubungan kerja bersifat subordinatif terhadap pemilik modal. Dalam konteks ini, ideologi kapitalisme bekerja secara hegemonik dengan membentuk cara pandang masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi merupakan kunci kemajuan.

## **b) Ideologi Konservatisme**

"Aduh, kamu itu baru dua belas. Tidak usah mikir yang aneh-aneh." (Tere Liye, 2024: 339)

Dalam kutipan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional masyarakat dan menghindari perilaku atau pemikiran yang dianggap tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan seseorang. Dalam ideologi konservatif, ada keyakinan bahwa generasi muda sebaiknya mengikuti aturan yang ada dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dianggap terlalu kompleks atau berisiko di usia muda. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa individu harus tunduk pada nilai-nilai yang mapan dalam masyarakat dan menghindari "perilaku yang aneh" atau tidak konvensional.

## **c) Ideologi Ekologisme**

"Mereka menulis di media, agar komite memikirkan generasi berikutnya. Memikirkan anak cucu bangsa, saat mewarisi lingkungan yang rusak oleh tambang. Wah, betul juga. Saya jadi merenung lama." (Tere Liye, 2024: 349)

Kutipan ini mencerminkan ideologi ekologi, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlindungan alam bagi generasi mendatang. Dalam ideologi ini, ada perhatian besar terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti pertambangan, terhadap keseimbangan ekosistem. Kalimat tersebut mengajak pembaca untuk berpikir tentang bagaimana kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, seperti tambang, akan mempengaruhi kondisi bumi yang akan diwariskan kepada anak cucu. Hal ini menunjukkan kesadaran tentang tanggung jawab ekologis untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Ideologi ekologi mendorong pemikiran yang lebih jauh tentang konsekuensi ekologis dari setiap tindakan manusia dan pentingnya menjaga sumber daya alam agar tidak mengalami kerusakan yang irreversibel (Abdullah, 2017).

## **Negara**

### **a. Masyarakat Sipil**

"Saya sudah menjawab iya. Mau apa lagi? Saya selalu berharap yang terbaik bagi rakyat. Jika ahli-ahli memutuskan tidak, kita batalkan saja. Tapi jika ahli-ahli bilang teruskan, saya harap rakyat juga bisa memahami. Sekali lagi, bukan pemerintah yang memutuskan. Ahli-ahli. Independen. Jadi semua bisa dibicarakan baik-baik dulu. jangan apa-apa langsung ditolak. Bagaimana mau maju, jika semua ditolak?" (Tere Liye, 2024: 65)

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pembentukan pandangan umum atau publik sedang berusaha dibangun sehingga bisa diterima (Riskiyono, 2015). Salah satu cara hegemonik berfungsi adalah dengan menciptakan konsensus di kalangan masyarakat tentang apa yang dianggap "benar" atau "baik". Dalam hal ini, ideologi teknokrasi menyatakan bahwa keputusan harus didasarkan pada

bukti dan keahlian, bukan politik atau opini publik yang tidak berdasar. Proses ini melibatkan pembentukan pandangan umum yang diterima, bahwa para ahli adalah otoritas yang lebih tepat untuk mengelola urusan masyarakat. Masyarakat yang mungkin tidak memahami secara mendalam tentang kebijakan atau masalah teknis lebih cenderung untuk menerima keputusan yang dibuat oleh teknokrat, karena mereka merasa bahwa kelompok ahli ini lebih tahu dan lebih berkompeten. Dengan mengedepankan "keputusan berdasarkan ahli" dan "progresivitas," teknokrasi dapat bertindak sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan tanpa banyak perlawanan, karena ideologi ini mendekonstruksi keberatan-keberatan publik dengan cara yang lebih rasional dan ilmiah, yang membuatnya lebih sulit untuk dibantah.

### **b. Masyarakat Politik**

“Daripada sibuk komplain mengurus satu-dua wawancara, suruh mereka menyumbang lagi, sepuluh kali lebih banyak, agar aku bisa memenangkan pemilihan ini. Kita butuh banyak amplop, sembako, pengumpulan massa. Beri tahu mereka, jika aku kalah, lupakan konsensi itu! Mereka tidak akan mendapat apa pun dari sana.” (Tere Liye, 2024: 66)

Pada kutipan di atas, untuk memenangkan dukungan dan mengukuhkan dominasi. Politik uang, amplop, sembako, dan pengumpulan massa adalah cara yang digunakan untuk membangun konsensus sosial dengan rakyat, tetapi pada saat yang sama juga menegaskan kekuasaan politik yang terjalin dalam hubungan transaksional. Hegemoni dalam konteks ini tidak hanya melibatkan penguasaan atas ideologi atau kebijakan, tetapi juga pada pengelolaan dan distribusi kekuasaan melalui sumber daya material yang dapat memengaruhi keputusan politik massa (Rahmanto, 2021). Cara ini berfungsi untuk menciptakan ketergantungan massa pada penguasa, dan dengan cara ini, membangun konsensus sosial yang mendukung dominasi politik melalui pemberian material. Massa yang menerima insentif materi cenderung tidak bertanya lebih jauh tentang kebijakan atau ideologi yang mendasari kekuasaan tersebut; yang penting bagi mereka adalah imbalan langsung yang mereka terima. Ini adalah bentuk dominasi yang lebih subtil—bukan dengan cara mengubah pemikiran atau kesadaran rakyat tentang apa yang benar, melainkan dengan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan konsensus dan dukungan (Solaiman, 2009). Dengan mengalihkan perhatian rakyat dari pertanyaan tentang kebijakan atau partisipasi dalam proses politik yang lebih luas, penguasa menciptakan suatu konsensus sosial ketika rakyat menerima kekuasaan mereka sebagai sesuatu yang sah, dengan harapan keuntungan material sebagai imbalannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye dengan menggunakan teori Antonio Gramsci, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. Pertama, ditemukan hegemoni kekuasaan dan pikiran. Hegemoni kekuasaan merujuk pada dominasi yang dipertahankan oleh PT. Semesta Minnerals & Minning dengan bantuan kekuasaan formal, seperti pemerintahan, militer, atau lembaga hukum. Dalam konteks ini, hegemoni kekuasaan lebih mengarah pada kontrol atas sumber daya material dan kemampuan untuk memaksa atau mengontrol perilaku individu dan kelompok melalui aturan, kebijakan, dan penggunaan kekuatan fisik. Kedua, hegemoni pikiran yang dilakukan oleh PT. Semesta Minnerals & Minning juga pemerintah untuk mengarahkan pikiran Masyarakat agar mendukung dominasi mereka. Ketiga, hegemoni media massa, merujuk pada pengaruh PT. Semesta Minnerals & Minning yang memiliki pengaruh dalam media untuk membentuk pandangan, norma, dan nilai-nilai tertentu untuk menguntungkan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka.

Selain hegemoni, terdapat berbagai macam ideologi yang dipaparkan dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*. Pertama, ideologi kapitalisme terlihat dalam fokus pada pembangunan infrastruktur besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi, dengan pekerjaan formal sebagai pilihan yang menguntungkan. Kedua, ideologi konservatisme tercermin dalam pandangan yang menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menghindari pemikiran yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangan individu. Ketiga, ideologi ekologi terlihat dalam kesadaran akan dampak buruk aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya melindungi alam untuk generasi mendatang, dengan menekankan keberlanjutan ekosistem. Ketiga ideologi ini mencerminkan pandangan terkait pembangunan ekonomi, konservasi budaya, dan perlindungan lingkungan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmadi, A. (2019). *Metode penelitian sastra*. Penerbit Graniti.
- Ahmadi, A. (2020). *Menulis mandiri konteks sastra dan psikologi*. Penerbit Graniti.
- Ahmadi, A. (2023). *Teori Sastra: Perspektif Apresiatif*. Penerbit Delima.
- Aminuddin. (2015). *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Sinar Baru Algensindo.
- Anwar, A. (2015). *Teori Sosial Sastra*. Ombak (Anggota IKAPI).
- Endraswara, S. (2013). *Metodologi penelitian antropologi sastra*. Ombak.
- Faruk. (2010). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (2013). *Prison Notebooks: Catatan-catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap pemikiran ekonomi kapitalisme adam smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Latifah, S., & Putra, C. R. W. (2020). Representasi Hegemoni Kekuasaan pada Zaman Kolonial dan Orde Baru dalam Novel *Balada Supri*. *Leksema: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 5 (1), 65–82. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v5i1.2107>
- Nurgiyantoro. (2013). *Teori Pengkajian Fiksi*. Gajah Mada University Press.

- Pawestri, S. (2015). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bibir Merah Karya Achmad Munif. <https://eprints.uny.ac.id/26766/>
- Rahmanto, F. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-pemilihan Presiden 2019 di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Simon, R. (2004). *Gramsci Political Thought (Gagasan-Gagasan Politik Gramsci)*. Yogyakarta: INSIST Dan Pustaka Pelajar.
- Siswanto, S. (2010). Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 21312. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v13i4%20Okt.2766>
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11-33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Solaiman, A. (2009). Perihal Demokrasi: Asal-Usul, Legitimasi, Konsensus Dan Ciri-Cirinya. *Sociae Polites*, 10(28). <https://core.ac.uk/download/pdf/236429003.pdf>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suseno, M. F. (2016). *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. PT Pustaka Pelajar.
- Taum, Y. Y. (2015). *Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Universitas Sanata Dharma.
- Wahyuni, P. (2019). Hegemoni kekuasaan dalam novel Hujan karya Tere Liye dan implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Skripta*, 5(1). <https://doi.org/10.31316/skripta.v5i1.127>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Yunita, G. F. R., & Putra, C. R. W. (2020). Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 16(2), 183-202. [10.26499/und.v16i2.2624](https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2624)